

Kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap wajib pajak yang merepatriasi harta melalui tax amnesty (pengampunan pajak) = Government's authority and responsibility for taxpayer who repatriate assets through tax amnesty

Ervina Yael Febrianty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520701&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang direpatriasi melalui tax amnesty. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengolah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk Bank Persepsi serta Pemerintah juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam prosesnya ditemukan maladministrasi dan/atau perbuatan melawan hukum.

.....This research discusses the authority of the Government in appointing a Perception Bank that collects taxpayer assets by analyzing the Government's authority in state administration and analyzing the Government's authority in taxation according to laws and regulations. This research will also discuss the responsibility of the Government and the Perception Bank for the shrinking of the taxpayer's assets that are repatriated through tax amnesty. This research is a normative juridical research by processing qualitative data. Based on the results of the research, the Government has the authority to appoint Perception Bank and the Government can also be held accountable for maladministration and/or illegal actions.